

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berakhirnya kolonialisme barat pada pertengahan abad ke-20, negara Muslim mengalami kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara praktik dan pemikiran politik Islam dengan negara di daerah masing-masing.¹

Demikian pula pada perpolitikan Negara kita yang mengalami perubahan. Dalam hal ini diawali dengan runtuhnya orde baru ini memberikan harapan angin segar kepada umat Islam untuk bangkit kembali dalam percaturan politik nasional yang pada masa Orde Baru termarjinalkan. Apabila melihat ke belakang, khususnya pada awal-awal kemerdekaan bahwa kegagalan politik umat Islam pada saat itu, terutama dalam hubungannya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan dasar negara memang merupakan suatu kenyataan pahit. Oleh karena itu, sehubungan dengan bergulirnya era reformasi ini banyak ide dan gagasan dari umat Islam untuk mengangkat kembali citra umat Islam, sehingga dapat memegang peran dalam percaturan politik nasional.

Jatuhnya rezim Orde Baru tidak terlepas dari gaya politik kekuasaannya yang cenderung otoriter, represif dan tidak demokratis. Dengan

¹ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1998), 2.

kekuatan utamanya, Golkar dan Militer, maka Orde Baru berhasil mempertahankan kelangsungan kekuasaannya selama tiga dasawarsa lebih. Sikap perlawanan dan oposisi yang dilakukan oleh kelas menengah muslim dan non muslim berhasil digagalkan, mengingat betapa sangat berkuasanya rezim ini dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Baru setelah krisis ekonomi menjalar ke Indonesia dan memporak-porandakan perekonomian nasional, arus deras perlawanan yang dilakukan mahasiswa dengan rakyat semakin menemukan momentumnya untuk menjatuhkan rezim Orde Baru. Tidak dapat dipungkiri lagi, akhirnya rezim Soeharto (Orde Baru) jatuh, dan digantikan wakilnya, B. J. Habibie.

Habibie diangkat sebagai presiden didasarkan pada pasal 8 ayat 3 UUD 1945 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Habibie tidak hanya seorang jenius di bidang kedirgantaraan pada waktu menjabat sebagai wakil presiden, dan juga murid politik Soeharto.² Dibandingkan dengan gurunya, Habibie tidak cukup beruntung. B. J. Habibie mewarisi negara dalam kondisi berantakan serta posisinya yang tampak lemah di mata rakyat.

Habibie adalah sosok intelektual sekaligus birokrat dan teknokrat yang religius. Selain dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Soeharto, beliau juga dekat dengan kalangan Cendekiawan Muslim sehingga beliau pernah dipercaya menjadi ketua umum ICMI.³ Karena background keislamannya yang cukup kuat itulah kelompok Islam terutama yang sering

² A. Makmur Makka, BJH: *Bacharuddin Jusuf Habibie, His Life and Career*, edisi III (Jakarta: Cidesindo, 1996), 87.

³ Nasrullah Ali Fauzi, *ICMI antara Status Quo dan Demokratisasi*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), 34.

disebut garis keras amat gigih membela dan mendukungnya, karena umat Islam banyak berharap agar Habibie banyak berbuat demi dan untuk kepentingan umat Islam.

Di era kepemimpinan Habibie, terutama setelah adanya kebebasan politik, Islam mengalami kebangkitan. Perubahan yang signifikan dari kelompok Islam dalam memaknai jatuhnya rezim Orde Baru, yang mulai mengakomodasikan aspirasi Islam. Aspirasi Islam lebih nampak di pentas politik nasional dibandingkan dengan periode Orde Baru yang belum sepenuhnya memberikan saluran politik Islam. Kejatuhan rezim Orde Baru membangkitkan kesadaran politik umat Islam untuk menyongsong periode baru, yakni periode kebangkitannya. Reformasi adalah awal periode kebangkitan kembali politik Islam di Indonesia. Dalam memahami politik Islam di penghujung Orde Baru, ada sebuah periode yang sering disebut sebagai fase kebangkitan politik Islam.⁴

Selain itu, Habibie dihadapkan pada tuntutan reformasi di semua bidang kehidupan yang menggema di mana-mana. Dalam kaitan ini, oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak *legitimate* untuk memimpin, karena dipandang sebagai bagian dari rezim Orde Baru yang harus disingkirkan. Hal ini tampaknya disadari pula oleh Habibie. Karena itu, sejak kepemimpinannya yang berkisar 517 hari, Habibie banyak melakukan tindakan populer guna mendongkrak legitimasinya dan pada saat yang sama

⁴ Eep Saefullah Fattah, “*Masa Depan Politik Islam : Dari Pusaran Menuju Arus Balik*” dalam Abu Zahro (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 13-14.

memasang kuda-kuda untuk pertarungan memperebutkan kursi presiden periode berikutnya.

Sejarah mencatat bahwa Habibie telah memberi kebebasan yang luar biasa kepada dunia pers, membebaskan tahanan politik (Tapol) dan narapidana politik (Napol), menggusur Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dari wacana politik nasional, menghapus keharusan pemakaian asas tunggal Pancasila bagi organisasi massa (Ormas) dan organisasi politik (Orpol), mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah (Otoda), kebebasan mendirikan partai politik bagi seluruh masyarakat dan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu pada bulan Juni 1999.

Diantaranya program Kebijakan B. J. Habibie:

1. Pemberi Amnesti⁵ bagi Tahanan Politik.

Mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti. Sejumlah tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan sedangkan Budiman Sudhatmiko ketua Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid.

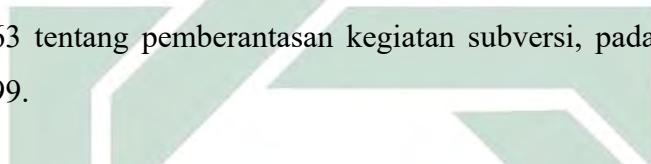
2. Bidang Kebebasan Berpendapat

- a. Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Marzuki Darusman, tugasnya adalah mencari segala sesuatu yang

⁵ Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

berhubungan dengan kerusuhan di Jakarta yang melibatkan mahasiswa Trisakti tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta.

- b. Mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang berisi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
 - c. Mencabut Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Aksi Subversi dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999 pencabutan undang-undang nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, pada tanggal 19 Mei 1999.



3. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 10-13 September 1998 selain mengukuhkan Habibie sebagai presiden Republik Indonesia, juga menghasilkan perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat ini ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat dan mencapai puncaknya dalam peristiwa Tragedi Semanggi (Semanggi I) yang menewaskan 18 orang.

Fokus perombakan sistem hukum perundang-undangan yang dihasilkan dalam Sidang Istimewa tersebut mengacu pada 12 ketetapan yang terbagi menjadi tiga bagian besar, yakni:

- a. Bagian ketetapan yang terdiri dari enam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru, antara lain:

- 1) Tap MPR No. X/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang Pokok-pokok pelaksanaan Reformasi Pembangunan sebagai Haluan Negara.
 - 2) Tap MPR No. XI/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 3) Tap MPR No. XIII/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang Pembatasan Masa Tugas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - 4) Tap MPR No. XV/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang Proses Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 - 5) Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang Penegakkan Hak Asasi Manusia.
- b. Bagian ketetapan yang terdiri dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengubah dan menambah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang lama, antara lain:
- 1) Tap MPR No. VII/MPR/1998 yang berisi perubahan dan penambahan terhadap Tap MPR No. I/MPR/1983 tanggal 13 September 1998 tentang Tatib Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia.
 - 2) Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang perubahan dan penambahan terhadap Tap MPR No. III/MPR/1983 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum.

c. Bagian ketetapan yang bersifat mencabut ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lama, antara lain:

- 1) Tap MPR No. VIII/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 yang berisi tentang pencabutan Tap MPR No. IV/MPR/1983 tanggal 13 September 1998 tentang referandum⁶ yang menjaga Undang-undang Dasar 1945. Pencabutan Tap ini berarti pula Undang-undang Dasar 1945 dapat dirubah dan diamandemen.
 - 2) Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang pencabutan Tap MPR No. II/ MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 - 3) Tap MPR No. XII/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Tugas dan Wewenang Presiden selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 - 4) Tap MPR No. IX/MPR/1998 tanggal 13 September 1998 tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

4. Kebebasan Pers. Presiden B. J. Habibie mengeluarkan kebijakan:

- a. Menghapus Surat Ijin Usaha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP) yang pada masa Orde Baru menjadi hal yang menakutkan dalam pers.
 - b. Melakukan penyederhanaan tentang penerbitan Pers baru.

⁶ penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen)

- c. Mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

5. Bidang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 1999. Setelah Presiden B. J. Habibie mencabut berbagai Undang-undang Politik warisan Orde Baru, kemudian dikeluarkan 3 undang-undang Politik baru yang mulai ditetapkan pada tanggal 1 Februari 1999, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
 - b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, diantaranya dijelaskan bahwa peraturan pemilihan umum bersifat campuran antara sistem proporsional dan sistem distrik.
 - c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik dengan sistem distrik atau perwakilan dan asas Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur, Adil). Dalam pemilihan umum tahun 1999 ada lima partai yang mengumpulkan suara terbanyak, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diketuai oleh Megawati Soekarno Putri, Partai Golongan Karya (GOLKAR) diketuai oleh Akbar Tanjung, Partai Persatuan Pembangunan diketuai

Hamzah Haz, Partai Kebangkitan Bangsa diketuai oleh Matori Abdul Djalil dan Partai Amanat Nasional diketuai oleh Amien Rais.

Setelah pemilihan umum selesai, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 1-21 Oktober 1999, diantaranya diputuskan:

- (1) Mengukuhkan Amien Rais sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (2) Menolak Pidato Pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie melalui Tap No. III/MPR/1999 tanggal 14 Oktober 1999.

Dapat kita ketahui Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan diaologis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan pemerintahan yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan cabinet sehari-haripun, Habibie melakukan perubahan besar. Beliau meningkatkan koordinasi dan menghapus *egosintesmi sekotral* antar menteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah negara.⁷

⁷ Enjang Odih B.A dan Drs Sukadi. *Sejarah Nasional dan Umum* (Ganeca Exaca :Bandung, 1994), 70.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini efektif dan efisien dalam memperoleh hasil temuan ilmiah, maka pengkajian diarahkan untuk menjawab tiga topik utama yang didasarkan pada pemaparan dalam latar belakang masalah diatas.

Adapun rumusan masalah pada pembahasan skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang berakhirnya masa Orde Baru?
 2. Bagaimana hubungan Negara dan Islam pada era B. J. Habibie?
 3. Bagaimana peta politik Islam pada masa Era B. J. Habibie?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang berakhirnya Orde Baru?
 2. Mengetahui sistem politik Islam di Indonesia pada masa pemerintahan B. J. Habibie (1998-1999 M)?
 3. Mengetahui Peta politik Islam pada masa B. J. Habibie (1998-1999 M)?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini semoga dapat memberi bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat akademis

Penelitian ini didasarkan untuk melatih Mahasiswa dalam penelitian tahap awal sebagai calon sarjana sejarah kebudayaan Islam, sehingga mahasiswa mampu mendapatkan materi lebih di luar mata

kuliah. Hasil penelitian dimaksudkan bisa dijadikan sebagai referensi dan dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut, dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.

2. Manfaat bagi Masyarakat umum.

Penelitian ini memfokuskan kepada sejarah politik islam pada masa pemerintahan B. J. Habibe sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan khalayak umum dan semua yang terkait memahami sejarah secara mendalam dan tidak menafsirkan sejarah secara garis besar tanpa mengetahui lebih dalam.

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritik

Langkah awal sebelum penelitian, terlebih dahulu penulis harus mengetahui pendekatan apa yang digunakan dalam penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan historis. Karena penulis berusaha mengungkapkan bagaimana latar belakang Politik Pada pemerintahan B. J. Habibie. Dalam studi sejarah menggunakan perspektif teoritis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji sangatlah penting, sehingga peristiwa sejarah dapat dieksplorasi dengan kritis dan mendalam.⁸ Sedangkan dalam hal perubahannya penulis menggunakan teori yang telah dikatakan oleh Max Weber.

⁸ Bugiono dan P.K. Poerwantara, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 83.

Menurut Max Weber suatu tindakan sosial itu merupakan tindakan yang subjektif yang juga dilengkapi tindakan yang lainnya dan diorientasikan dalam bentuk tindakan sosial. Sosiologi dikatakan sebagai ilmu berusaha memberikan pengertian tentang aksi-aksi sosial bagi Weber, Sosiologi adalah suatu ilmu yang berusaha memahami tindakan-tindakan sosial dengan menguraikannya, dengan menerangkan sebab tindakan tersebut yang menjadi inti dari sosiologi Weber bukanlah bentuk-bentuk substansial dari kehidupan masyarakat maupun arti yang nyata dari tindakan perseorangan yang timbul dari alasan-alasan subyektif.⁹

Sementara itu, dalam peranannya atau fungsinya penulis menggunakan teori Peran. Teori peran oleh Biddle dan Thomas adalah menyepadankan peristiwa dengan pembawa “lakon” oleh seorang pelaku dalam sandiwara. Orang yang membawakan peran disebut “pelaku” atau penampil. Kedua istilah itu sama-sama dapat menerangkan perihal pihak mana yang sedang membawakan perilaku peran. Namun diantara pihak-pihak tersebut, masih dapat dibedakan pihak mana yang menciptakan perilaku, serta pihak mana yang mendapatkan akibat dari perilaku tersebut. Pihak pertama disebut sebagai “lakon”, sedangkan pihak kedua disebut sebagai sasaran.¹⁰

Peranan merupakan proses dinamis dari status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dengan peranan adalah

⁹ Hotman M.Siahaan, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1986), 200.

¹⁰ Edi Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 7-13.

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

F. Penelitian terdahulu

1. Dinamika Pemikiran Politik Umat Islam Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Orde Reformasi. Thesis. Drs. Fahrudin, M.Ag. Tesis ini lebih mengarah kepada perjalanan politik. Tahun 1999. Jurusan Pengkajian Islam
 2. Metamorfosis Partai Politik Islam (Masyumi). Skripsi oleh Khilil Fathul Umam. Tahun 2007. Jurusan Siyasah Jinayah

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau prosedur untuk mendapatkan objek.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif historis deskriptif agar mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh, dan mendalam. Mengenai pengumpulan sumber, penulis menggunakan sumber sekunder dengan melakukan studi literatur dari buku, jurnal, artikel, skripsi. Buku-buku, skripsi, dan tesis, penulis dapatkan dari perpustakaan pusat UIN Sunan Ampel Surabaya, perpustakaan daerah Surabaya dan perpustakaan Islamic Center, sumber lain diperoleh dari media Ebook. Metode yang digunakan penulis untuk mengkaji judul di atas sebagai berikut:

¹¹ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 11.

a. Heuristik

Berasal dari bahasa Yunani *Heuristiken* yang artinya mengumpulkan atau mengumpulkan sumber. Sumber yang dimaksud dalam kajian sejarah ini adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi. seperti: Artikel, Buku, Undang-undang.

Peneliti sejarah dan sejarawan dalam mengumpulkan sumber atau jejak sejarah itu seperti menambang emas yaitu dari biji emas yang bercampur lumpur dan pasir sehingga biji emas tidak kelihatan. Seperti itulah pekerjaan peneliti dan sejarawan seperti menambang emas yang membutuhkan ketelitian dan ketelatenan.

Sumber merupakan bahan terpenting dalam proses penelitian atau penulisan sejarah. Karena tanpa sumber seorang peneliti atau sejarawan tidak akan mampu mengungkap fakta sejarah, dengan kata lain sejarawan harus terlebih dahulu memiliki data sebagai alat bantu.¹²

b. Kritik Sumber

Sebuah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber dengan cara melakukan kritik atau kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektifitas suatu kejadian.

Bekal utama seorang peneliti sejarah adalah sifat tidak percaya terhadap semua sumber sejarah. Peneliti harus lebih dulu mempunyai prasangka yang jelek atau ketidak percayaan terhadap sumber sejarah yang

¹² *Ibid.*, 29

tinggi. Bukan maksud tidak mempercayai sumber tapi kebenaran sumber harus diuji terlebih dahulu dan setelah hasilnya terbukti benar maka sejarawan baru percaya kebenaran sumber.¹³

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelusuran sumber. Teknik pengumpulan data tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa penelusuran sumber merupakan alat yang efisien dan efektif dalam menjaring data yang obyektif. Data sendiri diperoleh dari perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, perpustakaan daerah Jawa Timur, dan perpustakaan Islamic Centre.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub bab yaitu tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II: Membahas Berakhirnya Masa Orde Baru Dan Munculnya Era Reformasi mulai dari Berakhirnya Masa Orde Baru, Lahirnya Era Reformasi pada masa pemerintahan B. J. Habibie.

Bab III: Menelusuri hubungan Islam dan negara pada era B. J. Habibie, Masuknya Politik Islam Pada Masa Pemerintahan B. J. Habibie, Kebijakan Pada Masa Pemerintahan B. J. Habibie, Perkembangan Politik Islam Pada Pemerintahan B.J. Habibie.

¹³ *Ibid.*, 35.

ab IV: Pada bab ini membahas perkembangan politik Islam pada masa pemerintahan B. J. Habibie, dan Peta Gerakan Politik Islam Pada Masa B. J. Habibie (1998-1999 M).

Bab V: Dalam bab ini berisikan kesimpulan Agama dan Negara (Hubungan Islam dan Negara di bidang Politik Di Era B. J. Habibie Tahun 1998-1999 M).